

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP RISIKO OPERASIONAL
PERUSAHAAN**

(Studi Empiris pada Perusahaan BUMN di Kota Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

**ROBBY WAHYUDI
2004/48510**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD*
CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
RISIKO OPERASIONAL PERUSAHAAN

NAMA : ROBBY WAHYUDI

BP/NIM : 2004/48510

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS : EKONOMI

Padang, Juni 2011

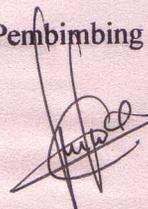
Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
NIP. 19580519 199001 1 001

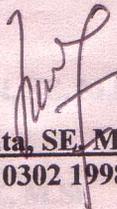
Pembimbing II



Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

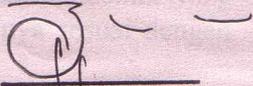
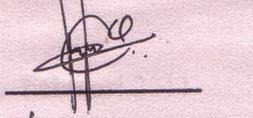
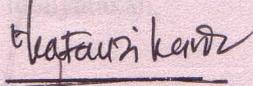
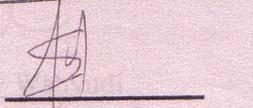
***Dinyatakan Lulus
Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang***

**Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
dan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
terhadap Risiko Operasional Perusahaan**

**Nama : Robby Wahyudi
BP/NIM : 2004/48510
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi**

Padang, Juni 2011

Tim Penguji

No. Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si Ak	1. 
2. Sekretaris	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	2. 
3. Anggota	Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	4. 

ABSTRAK

Robby Wahyudi 2004/48510: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Perusahaan Pada BUMN di Kota Padang. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

Pembimbing I : Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M.Si, Ak
Pembimbing II : Charoline cheisvianny, SE, M. Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris tentang; (1) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. (2) Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional perusahaan. (3) Pengaruh penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*. terhadap risiko operasional perusahaan untuk itu dilakukan penelitian pada perusahaan BUMN di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Penelitian kausatif merupakan tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan total sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner, yang disebarakan kepada perusahaan BUMN di Kota Padang yang berjumlah 30 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis jalur dan dilakukan uji t untuk melihat pengaruh secara parsial.

Temuan penelitian menunjukkan; (1) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap risiko operasional perusahaan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu, $2,829 > 1,7109$ (sig $0,010 < 0,05$) yang berarti H_1 diterima. (2) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu, $7,093 > 1,7109$ (sig $0,000 < 0,05$) yang berarti H_2 diterima. (3) Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap risiko operasional perusahaan, dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu, $3,416 > 1,7109$ (sig $0,002 < 0,05$) yang berarti H_3 diterima.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada cabang Perusahaan BUMN di Kota Padang untuk meningkatkan sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*, yang berguna untuk mengurangi risiko operasional perusahaan. Dalam pengelolaan perusahaan agar perusahaan menghindari dominasi yang tidak wajar yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan dan mengancam kestabilan perusahaan.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Risiko Operasional Perusahaan Pada BUMN di Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata satu (S1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Efrizal Syofyan, SE, M. Si, Ak. Selaku Pembimbing I dan ibuk Charoline cheisviyanny, SE, M. Ak selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu dan bimbingan serta masukan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Ketua dan Bapak Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
4. Bapak penelaah yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan proposal penulis.

5. Seluruh Pimpinan Kantor Cabang Perusahaan BUMN di Kota Padang.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran dan informasi yang sangat berguna.
8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyajikan skripsi ini dengan baik, walaupun dapat dikatakan jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
BAB II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12
1. Risiko Operasional	12
2. Sistem Pengendalian Intern.....	27
3. Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Govenance</i>	37
B. Penelitian Terdahulu	49
C. kerangka Konseptual	49
D. Hipotesis.....	53

BAB III.	METODE PENELITIAN	54
	A. Jenis Penelitian.....	54
	B. Populasi dan Sampel	54
	C. Jenis dan Sumber Data.....	56
	D. Metode Pengumpulan Data.....	56
	E. Variabel Penelitian	56
	F. Instrumen Penelitian	57
	G. Uji Validitas dan Reliabilitas	60
	H. Uji Asumsi Klasik.....	64
	I. Teknik Analisis Data.....	64
	J. Defenisi Operasional.....	70
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	72
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	72
	B. Demografi Responden	73
	C. Analisis Deskriptif	75
	D. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian.....	82
	E. Uji Asumsi Klasik	87
	F. Analisis Data	88
	G. Uji Hipotesis	96
	H. Pembahasan	98
BAB V.	PENUTUP	103
	A. Simpulan.....	103
	B. Keterbatasan Penelitian	103

C. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	iv

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar kantor cabang perusahaan BUMN di kota padang.....	55
2. Skala pengukuran.....	58
3. Kisi- kisi instrumen penelitian.....	58
4. Uji Pilot test.....	62
5. Uji Reliabilitas.....	63
6. Tingkat Pengembalian Kuesioner.....	72
7. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	73
8. Karakteristik responden beridikan dasarkan jenjang pendidikan.....	74
9. Karakteristik responden berdasarkan masa kerja.....	75
10. Uji Validitas Risiko Operasional Perusahaan	76
11. Uji Reliabilitas Risiko Operasional Perusahaan.....	77
12. Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	77
13. Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	78
14. Uji Validitas Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	79
15. Uji Reliabilitas Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	79
16. Uji Normalitas.....	80
17. Uji Homogenitas.....	81

18. Distribusi Frekuensi Variabel Sistem Pengendalian Intern.....	82
19. Distribusi Frekuensi Variabel Penerapan Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	84
20. Distribusi Frekuensi Variabel Risiko Operasional Perusahaan.....	87
21. Koefisien Regresi X.....	89
22. Model <i>Summary</i> X_1	90
23. Koefisien regresi Y.....	91
24. Model <i>Summary</i> X_2, X_1	93
25. Ringkasan hasil olahan data.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka konseptual penelitian	53
2. Struktur lengkap antar variabel.....	66
3. Sub struktur 1.....	66
4. Sub struktur 2.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Angket penelitian.....	105
2. Tabulasi angket <i>pilot test</i>	110
3. Reabilitas dan vadliditas <i>pilot test</i>	111
4. Tabulasi angket penelitian.....	112
5. Reabilitas dan vadliditas data penelitian.....	113
6. Uji Normalitas dan Uji Homogenitas.....	114
7. Uji Regres	115
8. Analisis Jalur.....	116
9. Tabel Distribusi Frekuensi.....	117

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perusahaan dituntut untuk tetap beroperasi pada tingkat efektivitas yang tinggi. Perusahaan juga diharuskan supaya berada dalam keadaan yang sehat agar mempunyai produktifitas yang tinggi dan berkualitas bagus. Untuk mencapai hal tersebut pengelolaan harus berjalan dengan baik dan sehat serta mematuhi prinsip-prinsip korporasi dan undang-undang yang berlaku, serta dapat menghindari segala risiko operasional yang mungkin terjadi dalam operasinya.

Risiko operasional dapat disebabkan dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan dan hal-hal yang tak terduga lainnya. Oleh karena itu, manajemen dituntut dapat meminimalkan segala bentuk risiko operasional yang berdampak negatif dan akan merugikan perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan, perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang tidak terduga seperti bencana alam, pencurian, kebakaran dan lain sebagainya, tetapi juga bisa dari dalam perusahaan itu sendiri yaitu dari kegiatan operasional perusahaan.

Dalam kegiatan operasionalnya perusahaan akan selalu berusaha untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada demi mendapat keuntungan yang memuaskan. Disamping itu, para manager perusahaan juga diharapkan mampu untuk meminimalisasi risiko, baik finansial maupun nonfinansial, yang ada di perusahaannya. Apabila dampak risiko itu terhadap operasi bisnis diperkirakan cukup signifikan, pimpinan perusahaan yang profesional akan menyusun rencana mengatasi atau mengurangi dampak negatif risiko atau mencegah risiko sehingga

risiko tersebut dapat diminimalkan bahkan dapat dihindari. Pencegahan risiko operasional perusahaan menyangkut serangkaian tindakan dalam pelaksanaan manajemen risiko untuk menanggulangi dampak negatif dari rencana bisnis perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Bank Indonesia (2006), risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Dalam melakukan pengelolaan terhadap perusahaan, manajemen perusahaan harus menerapkan sistem perencanaan, pengendalian dan pengawasan yang memadai terhadap semua aktivitas yang ada dalam perusahaan. Setiap proses kegiatan yang akan dijalankan harus terkoordinasi dengan baik dan dapat dikendalikan oleh setiap manajer yang memimpinya.

Pengendalian yang memadai tidak lepas dari sistem yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan, sistem yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran yang penting bagi perusahaan dapat tercapai.

Keyakinan yang memadai menunjukkan tingkat yang dicapai dan sistem pengendalian harus diseleksi dengan membandingkan biaya terhadap keuntungan yang diharapkan. Dari pengertian di atas dapat disampaikan bahwa kebijakan atau prosedur seringkali disebut dengan pengendalian dan secara bersama-sama membentuk sistem pengendalian intern perusahaan.

Pengendalian dapat dilaksanakan secara efektif melalui pemeriksaan dan pelaporan, namun pemeriksaan dan pelaporan umumnya bersifat *refrensif* yaitu suatu kecurangan telah terjadi yang berarti kejadian yang sudah berlalu. Untuk memperoleh pengendalian yang bersifat *preventif* maka perlu adanya pengendalian intern yang baik. Pengendalian intern ini dilakukan untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi pada aktivitas perusahaan yang merugikan baik secara *financial* maupun *non financial*.

Pengendalian intern meliputi perencanaan organisasi dan semua metode serta peraturan yang sederajat yang digunakan dalam perusahaan untuk menjaga kekayaannya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendorong dipatuhinya kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan manajemen (Holmes dan Burma, 1996 : 166). Sistem pengendalian intern yang handal dapat mencegah timbulnya kerugian karena penggunaan sumberdaya yang boros, keputusan manajemen yang tidak akurat dan sebagainya. Konsep pengendalian ini semakin lama semakin penting dan menempati posisi yang startegis karena ancaman terhadap risiko operasional meningkat baik dari sisi jenis maupun intensitasnya. Dengan demikian sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yaitu rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Sistem pengendalian interen yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisien tidak terjamin dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi (Mulyadi, 2001:173).

Sistem pengendalian intern yang efektif dapat mengurangi risiko material yang dapat mempengaruhi secara buruk pencapaian perusahaan, dan risiko sudah dapat diketahui secara terus menerus diperkirakan (ditaksir). Penaksiran harus mencakup semua risiko yang dihadapi perusahaan dan grup konsolidasi perusahaan tersebut meliputi, risiko kredit, *country and transfer risk*, risiko pasar, risiko suku bunga, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi (Dunil, 2005:32).

Corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan (Sutojo, 2005:3). *Good corporate governance* (GCG) dapat mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional perusahaan yang dilakukan oleh manajemen serta membantu dunia perbankan dalam menjalankan prinsip-prinsipnya sendiri yang sudah ada dan akan membantu tingkat pengembalian utang yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan maksimal bagi kreditur. GCG merupakan suatu sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan terutama pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, agar dapat mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam mencapai tujuan perusahaan (Tjager, 2003:25).

Implementasi GCG diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank umum. GCG dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi faktor utama pelaksanaan GCG. Dalam *Forum for corporate Governance in Indonesia* prinsip-prinsip GCG adalah :1) *fairness* (kewajaran), 2) *disclosure* dan *transparancy*

(transparansi), 3) *accountability* (akuntabilitas), 4) *responsibility* (responsibilitas), 5) *independensi* (profesional). Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi berarti keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. Akuntabilitas mengatur kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Responsibilitas yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi. Sedangkan independensi adalah pengelolaan perusahaan secara profesional (Tjager, 2003).

Selain itu penerapan praktik GCG ini diatur juga dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002. GCG dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi faktor utama pelaksanaan GCG, pertama, transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dua, kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Tiga, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan tanggung jawab sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Empat, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Lima, kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Tjager , 2003).

GCG dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh manajemen, menghindari kerugian akibat perlakuan diskriminatif, melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, menyajikan informasi secara wajar dan berkualitas, mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas, serta menghindari benturan kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian. GCG sebagai salah satu upaya untuk mencegah risiko bank ini dapat dilakukan dengan menjalankan prinsip-prinsip GCG itu sendiri. Praktik GCG dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, 2003:4).

Pelaksanaan GCG tergantung pada perusahaan yang mampu menjaga pengendalian internal sehingga mengurangi pengaruh risiko bisnis terhadap kegiatan perusahaan. Dengan penerapan sistem pengendalian intern (*internal control*) prinsip-prinsip GCG dapat terlaksana dengan baik dan konsisten (Sutojo, 2008:172).

Fenomena yang terjadi di dalam perusahaan sebagaimana yang diberitakan Badan Pemeriksaan Keuangan melalui situsnya, pemeriksaan terhadap BUMN

semester I 2007 menunjukkan adanya potensi yang merugikan keuangan perusahaan yang diakibatkan oleh ketidak profesionalnya manajemen dan kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Hasil penelusuran dari (Anonim) menyatakan bahwa kinerja dari BUMN sangat memprihatinkan dengan berbagai kasus seperti, kasus salah pencatatan di Semen Gersik dengan kemelut di anak perusahaan Semen Padang yang membuat audit laporan tidak tuntas hingga saat ini, dari kasus ini dapat di ketahui bahwa sistem pengendalian intern dari perusahaan Semen Padang lemah, karena tidak dapat menuntaskan laporan audit. Dari sudut pandang GCG Semen Padang tidak menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu pertanggung jawaban yang berarti kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Selain itu salah satu contoh kasus yang terjadi pada Bank Mandiri yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Padang *Consumer Crisis* (PCC), mendampingi Ariyanto Thaib, karyawan BUMN di Padang menggugat Bank Mandiri Cabang Indarung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang. Permasalahan yang terjadi adalah tidak ditanggapinya Somasi LPKSM PCC atas pembobolan rekening kecilnya melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sekitar Rp 155 juta. Gugatan tercatat di BPSK dengan No.Register 22/P3K/2008/BPSK yang diterima Kepala Sekretariat BPSK Khairul ST, Selasa (29/7). Diinformasikan bahwa tabungannya telah dikuras sekitar Rp 155 juta dalam satu hari pada tanggal 29 November 2007. Padahal saat itu ia telah meminta kepada *Operator Call* Mandiri agar memblokir

kartu ATM tersebut. Padahal sesuai ketentuan dan kesepakatan yang telah disetujui antara Bank Mandiri dengan setiap nasabah Tabungan Mandiri (*reguler*), hanya ada dua transaksi. Yaitu tarikan tunai maksimum satu hari sebesar Rp 5 juta dan transfer maksimum Rp 20 juta. Akan tetapi, hasil *print out* dari PT Bank Mandiri Cabang Indarung, Sabtu 1 Desember 2007 yang diminta bersama pihak kepolisian, tercatat tanggal 29 November 2007 terjadi penarikan sebesar Rp 89 juta (86 kali pengambilan), dan kemudian transfer Rp 40 juta dan transfer Rp13 juta. Selibuhnya dipergunakan pencuri untuk belanja/foya-foya di Hugo Café ([Anonim](#)).

Menurut Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Padang terkait kasus ini, objek gugatan bukan memperkarakan siapa yang membobol uang tabungan tersebut. Tetapi ketentuan dan kesepakatan yang diterapkan Bank Mandiri terhadap penarikan dan transfer Tabungan Mandiri tidak sesuai lagi dengan aturan yang sebenarnya, yang menyebabkan kerugian besar bagi nasabah ([Anonim](#)).

Salah satu bukti lemahnya pengendalian intern pada Bank Mandiri ini yaitu terjadinya penarikan dana sebesar 89 juta, padahal dalam aturan yang telah disetujui antara Bank Mandiri dan nasabah bahwa penarikan tunai yang boleh dilakukan dalam satu hari maksimum sebesar Rp 5 juta. Kasus ini dapat merusak nama baik Bank Mandiri dan akan mengurangi keinginan nasabah untuk menabung di Bank Mandiri, dari sudut pandang risiko operasional ini akan merugikan Bank Mandiri ([Anonim](#)).

Dari fenomena tersebut di atas dan uraian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dikarenakan masih sedikitnya penelitian dibidang Sistem Pengendalian Intern perusahaan ini. Hasil penelitian terdahulu dari (Herisno, 2008) menguji pengaruh tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan risiko operasional pada lembaga perbankan di kota Padang, yang menunjukkan hasil pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan risiko operasional. Beda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah adanya sistem pengendalian intern perusahaan sebagai variabel bebas dan meneliti di perusahaan BUMN di kota Padang. Selain itu pada penelitian ini memakai *variable intervening* yaitu penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Oleh karena itu peneliti berkeyakinan bahwa apabila hal ini tidak diteliti maka perusahaan akan selalu mengabaikan pengendalian intern perusahaan sehingga apabila pengendalian intern ini tidak diperhatikan maka akan besar kemungkinan terjadinya kecurangan maupun kesalahan pada perusahaan. Selain itu perusahaan-perusahaan BUMN di Padang masih belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip GCG yang akan menghindari perusahaan dari kesalahan-kesalahan yang berarti. Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Risiko Operasional Perusahaan pada BUMN di Kota Padang”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diketahui beebagai permasalahan.

Untuk itu penulis mengemukakan identifikasi masalah yaitu:

1. Seberapabesar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional perusahaan.
2. Seberapabesar pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip GCG terhadap risiko operasional perusahaan.
3. Seberapabesar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG
4. Seberapabesar pengaruh penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap sistem pengendalian intern

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan lebih terfokus, maka penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Seberapabesar pengaruh sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional perusahaan
2. Seberapabesar pengaruh penerapan prinsip GCG terhadap risiko operasional perusahaan.
3. Seberapabesar pengaruh sistim pengendalian intern terhadap GCG

D. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapabesar sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap risiko operasional perusahaan?

2. Seberapabesar pengaruh sistem pengendalian intern perusahaan terhadap GCG?
3. Seberapabesar pengaruh GCG terhadap risiko operasional perusahaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional perusahaan.
2. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pengendalian intern perusahaan terhadap GCG.
3. Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh GCG terhadap risiko operasional perusahaan

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan manfaat kepada :

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengendalian intern perusahaan serta pengaruhnya terhadap risiko operasional perusahaan.
2. Bagi perusahaan, dapat menjadi masukan dalam bidang sistem pengendalian intern perusahaan dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
3. Bagi akademis, dapat sebuah bukti empiris yang akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai sistem pengetahuan intern dan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Risiko Operasional

a. Risiko Operasional

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perseorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko. Manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Dengan berjalannya sistem manajemen risiko di perusahaan, maka perusahaan akan dapat mencegah risiko yang akan timbul dalam kegiatan operasional perusahaan.

Dampak risiko operasional timbul karena munculnya gangguan operasional dari dalam atau luar perusahaan. Gangguan operasional dari dalam perusahaan dapat berupa kerusakan mesin atau peralatan produksi yang lain, kesalahan manusia dan kesalahan sistem dan prosedur operasi. Sedangkan contoh gangguan dari luar perusahaan dapat berupa krisis moneter, krisis politik, faktor persaingan pasar, keterlambatan pasokan bahan dari perusahaan pemasok dan bencana alam.

b. Pengertian Risiko Operasional

Menurut Bank Indonesia (2006), risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

c. Contoh Risiko Operasional

1) Kehilangan pangsa pasar

Penyebab potensial karena muncul teknologi baru, pesaing kuat, tidak mampu meningkatkan usaha. Potensi kerugian yaitu penurunan hasil penjualan, penurunan keuntungan, kehilangan distributor andalan.

2) Perluasan usaha gagal

Penyebab potensial karena gagalnya mengevaluasi kelayakan perluasan, gagal mendapatkan dana investasi dengan biaya wajar. Potensi kerugian disebabkan kerugian finansial, tidak mampu mengembalikan kredit, kehilangan kepercayaan para pemegang saham.

3) Kecurangan (*intern dan ekstern*)

Penyebab potensial timbul lingkungan kerja yang tidak etis, tidak mematuhi peraturan intern dan ekstern. Potensi kerugian karena kerugian keuangan, penurunan reputasi bisnis, kehilangan kepercayaan para pemegang saham.

4) Kerusakan sarana produksi

Penyebab potensial disebabkan banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, gerakan separatisme, terorisme. Potensi kerugian, kerugian finansial, disebabkan kegiatan produksi terhenti.

d. Pengertian Manajemen Risiko

Pengertian Manajemen Risiko menurut Sutojo (2005:193) adalah kegiatan pimpinan puncak mengidentifikasi, mengevaluasi, menangani dan memonitor risiko bisnis yang dihadapi perusahaan mereka dimasa yang akan datang. Apabila dampak risiko itu terhadap operasi bisnis diperkirakan cukup signifikan, pimpinan perusahaan yang profesional akan menyusun rencana mengatasi atau mengurangi dampak negatif risiko tersebut. Manajemen risiko adalah bagian yang tak dapat dipisahkan dari *good corporate governance*. Manajemen risiko dapat diterapkan untuk menanggulangi dampak negatif rencana bisnis perusahaan secara keseluruhan.

e. Proses Manajemen Risiko

Menurut Sutojo (2005:201), langkah proses manajemen risiko adalah:

1. Mengidentifikasi risiko potensial

a. Potensi kerugian

Dalam mengidentifikasi risiko perusahaan memperkirakan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan tiap jenis risiko.

b. Daftar kuesioner risiko

Agar dapat mengidentifikasi risiko dan potensi kerugian yang dapat ditimbulkannya, komite audit atau eksekutif lain yang disertai tugas itu mengumpulkan pendapat pimpinan puncak.

2. Menganalisis risiko

- a. Tujuan analisis adalah memisahkan risiko yang potensi kerugiannya diperkirakan kecil dari yang derajat kerugiannya cukup signifikan.
- b. Batas toleransi adalah untuk menentukan dapat atau tidaknya dampak risiko ditolerir, perusahaan perlu menyusun kriteria tentang hal itu. Kriteria toleransi terhadap dampak risiko dapat diambil dari aspek operasional, teknis, finansial, legal, sosial atau kriteria lain.
- c. Bahan masukan kategorisasi.

Termasuk dalam daftar bahan masukan tersebut adalah :

- 1) Data atau laporan perusahaan tentang penanganan risiko yang sama pada masa lampau.
- 2) Pengalaman perusahaan dalam menangani tiap jenis risiko.
- 3) Praktik sektor usaha yang sama dalam menghadapi risiko yang sama.
- 4) Hasil riset atau tes yang bersangkutan dengan risiko tertentu yang dilakukan perusahaan sendiri.
- 5) Hasil riset pihak ketiga yang dipublikasikan.
- 6) Pendapat pakar spesialis

3. Memilih risiko

Dari hasil tahap-tahap manajemen risiko terdahulu perusahaan dapat memutuskan risiko bisnis mana dapat diterima karena dampak negatifnya diperkirakan masih dapat ditolerir.

4. Penanganan risiko

Penanganan risiko lebih lanjut meliputi aktifitas yang berikut:

a. Menentukan pilihan penanganan risiko.

Termasuk dalam pilihan penanganan risiko adalah sebagai berikut:

- 1) Menghindari risiko dengan jalan tidak meneruskan rencana kegiatan yang telah disusun.
- 2) Mengendalikan risiko.
 - a) Menjalankan program audit.
 - b) Melakukan supervisi ketat atas pelaksanaan rencana kegiatan.
 - c) Melakukan inspeksi ketat atas pelaksanaan rencana.
 - d) Menjalankan perawatan preventif sarana produksi.
 - e) Melakukan percobaan, misalnya tes pemasaran sebelum rencana kegiatan dilaksanakan penuh.
 - f) Menjalankan program *training* penanggulangan risiko.
 - g) Manajemen proyek
 - h) Melaksanakan program riset teknis dan pengembangan yang matang sebelum rencana kegiatan yang disusun dimulai.

3) Mengurangi dampak risiko.

Upaya mengurangi potensi risiko adalah :

- a) Dalam pembangunan proyek, menandatangani *turnkey contract* dengan perusahaan pemasok sarana produksi yang diperlukan.
 - b) Menyusun rencana alternatif.
 - c) Menyusun rencana penanggulangan apabila risiko benar-benar muncul.
 - d) Menyusun program pengendalian kecurangan intern dan ekstern perusahaan.
- 4) Mengalihkan risiko kepada pihak ketiga, misalnya menutup perjanjian asuransi, atau mengundang pihak ketiga menjadi mitra usaha dalam melaksanakan rencana kegiatan.
- 5) Menanggung sebagian risiko yang tidak atau belum dialihkan kepada pihak ketiga.

b. Mengevaluasi tiap jenis pilihan.

Tiap jenis pilihan penanganan risiko di atas dievaluasi berdasarkan perbandingan besar pengorbanan (termasuk biaya) yang harus ditanggung perusahaan, dengan nilai manfaat yang dapat diperoleh dari masing-masing pilihan. Tiap jenis pilihan penanganan risiko yang mendatangkan manfaat optimal dengan biaya atau pengorbanan minimal, dimasukkan dalam daftar prioritas pilihan.

c. Menyiapkan rencana penanganan.

Rencana penanganan risiko mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Siapa akan menjadi penanggung jawab penanganan.
- 2) Apa saja yang perlu mereka lakukan.
- 3) Jadwal kegiatan dan hasil yang diharapkan.
- 4) Tenaga eksekutif, alat dan anggaran yang dibutuhkan.
- 5) Tolak ukur kinerja penanganan, dan
- 6) Mekanisme peninjauan kembali pilihan.

5. Memonitor risiko.

Secara regular perusahaan wajib memonitor perkembangan risiko yang mereka hadapi dan efektifitas upaya mereka menangani masing-masing risiko.

f. Manajemen Risiko Operasional

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang pedoman manajemen risiko dalam perbankan di Indonesia mewajibkan bank-bank untuk membuat pedoman penerapan manajemen risiko. Pedoman dalam manajemen risiko yaitu:

1. Sistem Informasi Manajemen

Bank perlu memiliki sistem informasi manajemen yang terpadu yang dapat menjamin bahwa seluruh eksposur risiko diukur secara akurat, informatif dan tepat waktu (Suhardjono, 2003:81).

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan sistem informasi risiko antara lain:

- a. Tersedianya sistem komunikasi yang memungkinkan tersalurnya informasi secara efektif mengenai prosedur manajemen risiko.
- b. Sistem informasi harus dapat mendukung proses manajemen risiko yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko.
- c. Sistem informasi manajemen harus mampu menghasilkan informasi yang tepat waktu, akurat, konsisten, komprehensif dan relevan.
- d. Penyampaian informasi harus dilaporkan pada setiap jenjang manajemen.

2. Identifikasi dan Analisis Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko dan analisa risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang terkandung pada setiap kegiatan operasional yang berpotensi merugikan perusahaan.

3. Pendekatan Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko perusahaan guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut harus mengukur sensitifitas produk terhadap perubahan faktor-faktor terkait baik dalam kondisi normal maupun kondisi yang tidak normal.

4. Evaluasi dan Kaji Ulang Manajemen

Manajemen risiko harus dikaji dan dievaluasi secara berkala oleh *risk manager* dan auditor internal.

Pentingnya penerapan manajemen risiko di Badan Usaha Milik Negara dipertegas dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M.BU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN. Pasal 28 (2) Kep-117/M.BU/2002 menyebutkan bahwa selain laporan tahunan dan laporan keuangan, BUMN harus mengungkapkan hal-hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, pemegang saham, kreditur, dan para stakeholder lain, antara lain mengenai faktor risiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan faktor risiko. Pasal 14 (8) Kep-117/M.BU/2002 menyebutkan bahwa Komite Asuransi dan Risiko Usaha bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh BUMN dalam hubungannya dengan risiko usaha.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko di BUMN tersebut, maka BPKP sebagai Auditor Intern pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih, dengan dukungan tenaga profesional telah merespon secara aktif untuk mendorong penerapan manajemen risiko di BUMN/D dengan cara menciptakan produk

unggulan BPKP di bidang manajemen risiko untuk perusahaan. Profil produk manajemen risiko BUMN adalah :

1. Sosialisasi/*Workshop/Training* Manajemen Risiko Metodologi

Sosialisasi/*workshop/training* manajemen risiko merupakan kegiatan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan bagi manajemen perusahaan untuk melaksanakan risk assessment, menyusun pedoman kebijakan manajemen risiko, mengimplementasikan manajemen risiko, dan mengevaluasi tingkat kematangan implementasi manajemen risiko. Kegiatan sosialisasi/*workshop/training* manajemen risiko dilakukan selama 4-5 hari dengan materi berupa konsep risiko, manajemen risiko, *risk assessment*, simulasi *risk assessment*, dan kebijakan manajemen risiko, serta evaluasi manajemen risiko.

2. *Asistensi Risk Assessment*

Asistensi Risk Assessment merupakan jasa konsultasi manajemen risiko untuk membantu menyusun peta atau profil risiko perusahaan dan memberikan rekomendasi cara penanganan risiko perusahaan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memahami bisnis perusahaan, mengidentifikasi risiko, menganalisis/mengukur risiko yang teridentifikasi, dan menentukan prioritas risiko, serta menentukan cara penanganan risiko lebih lanjut. Hasil *risk assessment* adalah profil risiko yaitu gambaran risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan urutan prioritasnya sesuai dengan level risiko. Level risiko diperoleh dari perkalian antara *likelihood* dan konsekuensi masing-masing risiko. Hasil

risk assessment ini selain bermanfaat untuk menentukan risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, juga sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi cara penanganan risiko perusahaan.

3. Asistensi Penyusunan Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Asistensi

Penyusunan pedoman kebijakan manajemen risiko merupakan jasa konsultasi manajemen risiko untuk membantu perusahaan menyusun pedoman kebijakan manajemen risiko. Pedoman kebijakan manajemen risiko dipakai sebagai kebijakan, panduan umum, prosedur, dan instruksi kerja dalam menerapkan manajemen risiko. Hasil asistensi penyusunan pedoman kebijakan manajemen risiko ini adalah berupa pedoman kebijakan manajemen risiko yang terdiri dari pernyataan komitmen manajemen risiko perusahaan, pedoman umum manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, instruksi kerja manajemen risiko, dan formulir manajemen risiko.

4. Evaluasi Efektivitas Manajemen Risiko

Evaluasi efektivitas manajemen risiko merupakan jasa konsultasi manajemen risiko untuk membantu perusahaan menilai atau mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko perusahaan. Hasil evaluasi atas efektivitas manajemen risiko adalah berupa rekomendasi perbaikan penerapan manajemen risiko perusahaan.

g. Tahap Pengendalian Risiko

Menurut Umar (2001:17), empat tahapan dalam mengendalikan risiko adalah:

1. Menyadari adanya risiko.

Perusahaan sebaiknya menggunakan metodologi yang standar dalam menilai jenis masing-masing risiko agar dapat membantu manajemen untuk mengevaluasi risiko yang lebih mudah.

2. Menentukan prioritas.

Perusahaan harus dapat menetapkan risiko-risiko yang memiliki prioritas tinggi melalui pengidentifikasian bahaya yang berisiko besar.

3. Mencegah terjadinya risiko dengan cara:

- a. Peminimalan risiko ditiap aspek organisasi perusahaan.
- b. Pemindahan risiko (seperti memindahkan risiko dengan cara membeli asuransi).
- c. Penyebaran risiko (misalnya dengan portofolio).
- d. Merencanakan antisipasi risiko yang terburuk.

h. Pengendalian Risiko Berdasarkan Teori *Smoking*

Gun dalam Umar (2001), menyarankan enam cara untuk mengendalikan risiko:

1. Strategi perusahaan.

Hendaknya perusahaan beroperasi pada pasar yang tepat serta menawarkan produk-produk yang tepat pula.

2. Menyusun kebijakan risiko melalui :

a. Menetapkan standar dari atas.

Manajemen puncak harus terlibat dalam penetapan kebijakan perusahaan terhadap risiko dan punya komitmen terhadap kebijakan yang dibuat.

b. Alokasi tanggung jawab pada manajemen risiko.

Masing-masing risiko yang besar pada gilirannya akan diserahkan pada seseorang untuk tanggung jawab.

c. Manajer risiko yang bertugas:

1) Mengevaluasi risiko-risiko perusahaan.

2) Memperkenalkan rencana-rencana untuk meminimalkan risiko.

3). Memberikan pengertian kepada para karyawan bagaimana cara mengendalikan risiko.

d. Melatih orang agar sadar risiko dan mengurangi kesalahan.

Para manajer harus mendapatkan pelatihan dalam mengendalikan risiko mereka dan mereka juga harus melatih para bawahan mereka.

e. Alih tanggung jawab dan kultur keterbukaan.

Perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada para karyawannya untuk memberikan pendapat-pendapat termasuk kritik-kritik mereka yang membangun.

3. Mengendalikan proses.

a. Implementasi sistem manajemen yang lengkap bagi seluruh risiko yang tergolong tinggi.

b. Bersiap jika timbul masalah.

Perusahaan harus melaksanakan program-program latihan untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang sifatnya darurat agar selalu tetap siaga.

c. Memperkenalkan solusi-solusi yang lebih aman.

d. Mengisolasi ancaman.

Membuat rintangan-rintangan secara fisik agar mesin-mesin atau perlengkapan lain tidak dapat dipindahkan secara bebas.

e. Melindungi harta benda.

Perusahaan dapat meminimalkan kerusakan yang terjadi jika ancaman benar-benar terjadi. Contohnya, alat penyemprot air yang laik dapat meminimalkan percikan air.

4. Penyebaran risiko.

Menginvestasikan dana dengan cara membeli saham dari beberapa perusahaan, mengembangkan teknologi baru yang produknya dapat eksis dan bersaing dengan produk lain.

5. Memonitor risiko.

Perusahaan secara regular wajib memonitor perkembangan risiko yang mereka hadapi. Dari situ perusahaan akan dapat melihat

seberapa efektifnya mereka untuk menangani risiko tersebut.

Memonitor risiko diantaranya:

a. Mengukur risiko.

Perusahaan harus dapat mengukur risiko-risikonya. Pengukuran-pengukuran yang dilakukan hendaknya dapat membuat perusahaan tahu dimana letak sifat rawan pada perusahaan berada serta berapa besar risikonya.

b. Memiliki sistem peringatan yang lebih cepat.

Perusahaan hendaknya memiliki informasi perdagangan yang tersedia seakurat mungkin, tidak hanya menunggu sampai akhir bulan. Manajemen harus dapat mengetahui adanya tanda-tanda yang riskan.

c. Dokumentasi.

Manajer risiko perlu menyimpan catatan-catatan dan data.

d. Mengaudit risiko.

Program audit dapat menggunakan *checklist* untuk meyakinkan bahwa risiko-risiko itu telah diidentifikasi dan akan terus dikendalikan.

6. Asuransi lawan risiko.

Asuransi seharusnya tidak boleh diabaikan. Ia hendaknya merupakan bagian dari rencana manajemen untuk mengantisipasi risiko bisnis yang terjadinya tidak terduga.

2. Pengendalian Internal

Pengendalian internal suatu proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen dalam kategori reliabilitas pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, serta ketaatan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (Arens, 2008:370). Pengendalian intern meliputi rencana organisasi serta semua metode-metode dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinir yang dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta miliknya dan memeriksa kecermatan, ketelitian dari data akuntansi, meningkatkan efisiensi perusahaan dan mendorong ditaatinya kebijakan pemimpin. (Mulyadi, 1992:165).

Menurut Krismiaji (2002:215), pengendalian (*control*) adalah proses mempengaruhi atau mengarahkan aktivitas sebuah obyek, organisasi, atau sistem. Akuntan sering mempergunakan istilah pengendalian intern (*internal control*) sebagai salah satu sinonim untuk pengendalian didalam organisasi perusahaan. Suatu sejarah singkat konsepsi pengendalian intern perlu diperhatikan. Istilah pertama kali didefinisikan dalam tahun 1949 oleh suatu komite institut akuntan Amerika (sekarang namanya *American Institute Of Certified Public Accountant* atau AICPA) sebagai berikut :

Pengendalian intern (*internal control*) meliputi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinir dan tindakan/ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta (kekayaan)nya, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen.

Sistem pengendalian intern yang handal dapat mencegah timbulnya kerugian karena penggunaan sumberdaya yang boros, keputusan manajemen yang tidak akurat dan sebagainya. Konsep pengendalian ini semakin lama semakin penting dan menempati posisi yang strategis karena ancaman terhadap risiko operasional meningkat baik dari sisi jenis maupun intensitasnya. Dengan demikian sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yaitu rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Pengendalian intern dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi.

- a. Pengendalian administrasi adalah pengendalian yang menjamin efesiensi operasional dan ketaatan kebijakan manajemen. Sebaliknya pengendalian akuntansi (*accounting control*) adalah pengendalian yang bertujuan membantu menjaga aktiva dan menjamin akurasi dan daya andal catatan keuangan perusahaan.

Definisi ini muncul dalam literatur profesional AICPA, walaupun telah beberapa kali diterbitkan dengan perluasan atau penjelasan. Sebagai contoh pengumuman publikasi tahun 1958 mengemukakan perbedaan berikut ini antara pengendalian akuntansi (*accounting control*) dan pengendalian administrasi (*administratif control*).

Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua metode serta prosedur yang berkaitan terutama dengan dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta/kekayaan dan keandalan catatan keuangan. Sedangkan pengendalian administrasi meliputi rencana organisasi dan semua metode serta prosedur yang berkaitan terutama dengan efisiensi operasi dan ketaatan terhadap kebijakan manajemen.

b. Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan prosedur serta catatan yang berkenaan dengan pengamanan harta/kekayaan dan keandalan catatan keuangan dan dengan sendirinya didesain/disusun untuk memberikan jaminan bahwa:

- 1) transaksi dilaksanakan sesuai dengan otorisasi umum dan otorisasi spesifik manajemen.
- 2) transaksi dicatat karena perlu (1) untuk mempermudah penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim atau kriteria lain apapun yang dapat diterapkan pada laporan tersebut dan (2) untuk menyelenggarakan pertanggung jawaban harta/kekayaan.
- 3) turut campur terhadap harta/kekayaan hanya diperkenankan sesuai dengan otorisasi manajemen.
- 4) pertanggungjawaban harta yang dicatat dibandingkan dengan harta yang ada dengan frekuensi yang cukup beralasan dan tindakan yang tepat diambil terhadap setiap perbedaan.

a. Struktur Pengendalian Internal

Struktur Pengendalian Internal adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus

organisasi akan dicapai. Struktur pengendalian intern ini memiliki lima elemen, yaitu :

Menurut Arens (2008), komponen pengendalian intern terdiri dari :

1. *Lingkungan pengendalian.* Lingkungan pengendalian terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap manajemen puncak, para direktur, dan pemilik entitas secara keseluruhan mengenai pengendalian internal serta arti penting bagi entitas itu. Subkomponen pengendalian yang paling penting antara lain :

- 1) integritas dan nilai etika
- 2) komitmen pada kompetensi
- 3) partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- 4) filosofi dan gaya operasi manajemen
- 5) struktur organisasi
- 6) kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. *Penilaian risiko.* Penilaian risiko adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dengan penyusunan laporan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

3. *Aktivitas pengendalian.* Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai

tujuan dari entitas tersebut. Aktivitas pengendalian umumnya dibagi sebagai berikut :

- 1) Pemisahan tugas yang memadai
- 2) Pemisahan penyimpanan aktiva dari akuntansi.
- 3) Pemisahan otorisasi transaksi dari penyimpanan aktiva terkait
- 4) Pemisahan tanggung jawab operasional dari tanggung jawab pencatatan
- 5) Pemisahan tugas TI dari departemen pemakai
- 6) Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas.
- 7) Otorisasi khusus
- 8) Dokumen dan pencatatan memadai
- 9) Pengendalian fisik atas aktiva dan catatan
- 10) Pemeriksaan independen atas kinerja

4. Informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi dari entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang dilakukan entitas itu serta mempertahankan akuntabilitas aktiva terkait. Untuk memahami perancangan sistem informasi akuntansi auditor harus menentukan :

- 1) Kelas transaksi utama entitas
- 2) Bagaimana transaksi dimulai dan dicatat
- 3) Catatan apa saja yang ada beserta sifatnya
- 4) Bagaimana sistem itu menangkap peristiwa-peristiwa lain yang penting bagi laporan keuangan

- 5) Sifat serta rincian proses laporan keuangan yang diikuti
5. *pemantauan*. Pemantauan berhubungan dengan penilaian mutu pengendalian internal secara berkelanjutan atau periodik oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu telah beroperasi seperti yang diharapkan.

b. Klasifikasi Pengendalian Intern

Konsep pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi memiliki cakupan yang luas dan dimaksudkan untuk menguraikan seluruh sistem pengendalian. Prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi sebagai berikut :

1. Menurut Tujuannya

Pengendalian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengendalian preventif, pengendalian *detektif*, dan pengendalian *korektif*. Pengendalian *preventif* dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Contoh pengendalian *preventif* adalah mengangkat karyawan bagian akuntansi yang berkualitas baik, memisahkan tugas antar karyawan secara tegas, melakukan pengawasan fisik secara efektif terhadap akses ke aktiva, fasilitas, dan data perusahaan. Karena tidak semua potensi masalah dapat dicegah, maka perusahaan memerlukan pengendalian *detektif* untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi. Contoh pengendalian *detektif* adalah melakukan pengecekan ulang,

membuat rekonsiliasi bank, dan membuat neraca saldo bulanan. Pengendalian *korektif* dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian *detektif*. Kegiatan pengendalian *korektif* ini mencakup tiga langkah, yaitu (1) mengidentifikasi penyebab munculnya sebuah masalah, (2) membetulkan berbagai kesalahan yang terjadi, dan (3) memodifikasi sistem sehingga masalah yang sama di masa mendatang dapat diminimumkan atau dieliminasi. Contoh pengendalian ini antara lain memelihara cadangan (*backup*) transaksi pokok dan file induk dan melekatkan ke prosedur koreksi lain.

2. Menurut Waktu Pelaksanaanya

Pengendalian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu (1) pengendalian umpan balik (*feedback control*), dan (2) pengendalian dini (*feedforward control*). *Feedforward control* adalah pengendalian yang termasuk dalam kelompok pengendalian *preventif*, karena jenis pengawasan ini memonitor proses dan input untuk memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi (*potential problems*). Jika masalah dapat diidentifikasi sebelum masalah tersebut muncul, maka penyesuaian dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya. Sebagai contoh sistem penganggaran digunakan untuk memonitor arus kas perusahaan, sehingga perusahaan dapat segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi adanya penyimpangan arus kas dari anggarannya. Contoh lain adalah sistem pengawasan persediaan yang memprediksi kapan satu jenis barang akan habis dan

mulai dipesankan lagi untuk menambah jumlah barang yang tersedia. *Feedback control* adalah pengendalian yang masuk dalam kelompok pengawasan *detektif*, karena jenis pengawasan ini mengukur sebuah proses dan meyesuainya apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula. Sebagai contoh, sistem akuntansi pertanggung jawaban mengukur biaya pelaksanaan proses bisnis dan membuat laporan kinerja untuk manajemen ketika biaya tersebut secara substansial melebihi atau lebih besar dibandingkan dengan angka anggarannya.

3. Menurut Obyek yang Dikendalikan

Pengawasan dikelompokkan menjadi dua, yaitu (1) pengawasan umum (*general control*), dan (2) pengawasan aplikasi (*application control*). Pengawasan umum adalah pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas pengawasan aplikasi. Pengawasan aplikasi adalah pengawasan yang dipergunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses.

c. Ciri-ciri dan Manfaat Sistem Pengendalian Intern

Peranan sistem pengendalin intern sangat penting sekali dalam mencapai tujuan usaha, sehingga dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap sistem pengendalian intern. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Perkembangan ruang gerak dan usaha perusahaan telah menyebabkan struktur organisasi menjadi rumit dan luas, sehingga untuk mengawasi operasi efektif, manajemen tergantung pada analisa.
- b. Tanggung jawab utama untuk melindungi harta perusahaan mencegah dan menemukan kesalahan serta kekurangan-kekurangan terletak pada manajemen, sehingga manajemen harus membuat sistem pengendalian intern.
- c. Pengendalian yang dilakukan lebih dari satu orang merupakan ciri khas dari sistem pengendalian intern yang dapat menutupi kekurangan yang ada pada manusia, kesalahan itu dengan segera dapat diketahui.

Pengendalian intern sangat diperlukan sekali oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang membuat pengendalian intern sangat penting bagi seorang manajer dan organisasi adalah :

- a. Perubahan lingkungan suatu organisasi mengakibatkan semakin dibutuhkan adanya pengendalian intern, fungsi pengendalian memungkinkan manajer untuk mengetahui adanya perubahan yang dapat mempengaruhi barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga dapat siap untuk menghadapi ancaman atau kesempatan yang timbul dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.
- b. Kompleksitas, dalam suatu perusahaan yang kecil pemimpin/pemilik langsung mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan perusahaannya, semakin besar kegiatan perusahaan makin besar pula dibutuhkannya pengendalian untuk dapat mewujudkan

efisiensi dan mengungkapkan penyimpangan atau perkembangan yang kurang menguntungkan perusahaan.

- c. Kesalahan, jika anggota organisasi tidak pernah membuat kesalahan maka manajer dapat dengan mudah menentukan prestasinya, tetapi besar kemungkinan anggota organisasi membuat kesalahan. SPI membantu manajer untuk mengatasi kesalahan-kesalahan sebelum hasilnya menjadi kritis.
- d. Pendelegasian, bila manajer melimpahkan kepada bawahannya tanggung jawab kepada anggotanya tidak berkurang, cara untuk mengetahui apakah bawahannya telah melaksanakan tugas yang di delegasikan kepadanya adalah dengan menerapkan SPI.

d. Kualitas Pengendalian Internal

Fungsi ketiga dari sistem informasi akuntansi adalah menyediakan pengendalian internal yang memadai untuk mencapai tiga tujuan dasar berikut:

- a. Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem dapat diandalkan
- b. Memastikan bahwa aktifitas bisnis dilaksanakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta tidak melanggar kebijakan pemerintah yang berlaku.
- c. Menjaga aset-aset organisasi.

Mencapai keamanan dan pengendalian yang memadai atas sumber daya informasi suatu organisasi merupakan prioritas utama manajemen puncak

(Romney, 2006:228). Sebagai contoh, dalam penyajian laporan keuangan yang merupakan alat pertanggung jawaban manajemen puncak atas hasil pengelolaan terhadap kekayaan yang dipercayakan kepadanya oleh pemilik perusahaan. Keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat ditentukan oleh baik atau tidaknya pengendalian internal akuntansi yang berlaku dalam perusahaan. Jika pengendalian internal akuntansi dirancang dan diterapkan dengan baik oleh manajemen di dalam pengelolaan perusahaannya, maka laporan keuangan yang disajikan kepada pihak yang berkepentingan akan terjamin ketelitian dan keandalannya. Sistem pengendalian internal yang lemah akan mengakibatkan kekayaan perusahaan tidak terjamin keamanannya, informasi akuntansi tidak teliti dan tidak andal, efisiensi tidak terjamin dan kebijakan manajemen tidak dapat dipatuhi (Mulyadi, 2001: 177).

Dengan penerapan sistem pengendalian intern (*internal control*) prinsip-prinsip GCG dapat terlaksana dengan baik dan konsisten (Sutojo, 2008:172).

3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Situasi eksternal dan internal perusahaan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat (*good corporate governance*) dibidang perbankan (Surya, 2006:116).

Corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan (Sutojo, 2005:3). *Good corporate governance* (GCG) dapat mengeliminasi kemungkinan penyimpangan

operasional perusahaan yang dilakukan oleh manajemen serta membantu perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsipnya sendiri yang sudah ada dan akan membantu tingkat pengembalian utang yang lebih tinggi dan memberikan keuntungan maksimal bagi kreditur.

GCG merupakan suatu sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan terutama pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, agar dapat mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam mencapai tujuan perusahaan (Tjager, 2003:25). Praktik GCG dapat meningkatkan nilai (*valuation*) perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan mereka, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri, dan umumnya GCG dapat meningkatkan kepercayaan investor (Tjager, 2003:4).

Negara, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar yang saling berhubungan dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk menerapkan GCG. Pada saat ketiga pilar tersebut masing-masing melaksanakan perannya dengan baik, maka dapat tercipta pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pasar seperti itu dunia usaha dapat lebih kondusif dalam berusaha atas dasar prinsip GCG transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (www.governance-indonesia.com).

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pengertian GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* FCGI, (2003) adalah:

“Good Governance is collection of board principles an practices for the efficient, effective, and profitable running of an organization in pursuit of strategic objectives and in compliance with principles of best business practice and applicable legal and regulatory requirements.”

FCGI memandang bahwa tata kelola perusahaan yang baik mencakup prinsip dan praktik dewan pengurus untuk efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas perusahaan dalam mencapai sasaran objektif dan keselarasannya dengan prinsip praktik bisnis terbaik dan dapat digunakan secara legal dan keperluan pengaturan.

Keputusan menteri negara BUMN nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik GCG pada BUMN mendefinisikan GCG sebagai :

*“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.”*

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* pada intinya adalah mengenai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. GCG dimaksudkan

untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan (*mistakes*) signifikan dalam strategi korporasi dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera.

b. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Sutojo, (2005:5) ada lima tujuan utama *good corporate governance* adalah:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

Menurut Surya, (2006:68) tujuan *good corporate governance* adalah:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan.
5. Melindungi Direksi dan Komisaris dari tuntutan hukum.

c. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *corporate governance* menurut *Ocean for Economic Corporation and Development/OECD*, (2004) adalah:

1. Landasan hukum yang diperlukan untuk menjamin penerapan *good corporate governance* secara efektif.

Apabila pemerintah suatu negara menginginkan prinsip-prinsip GCG diterapkan secara efektif di negaranya wajib membangun landasan hukum yang memungkinkan hal itu terjadi. Landasan hukum tersebut berupa penciptaan undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang perburuhan, undang-undang tentang kredit perbankan, ketentuan tentang SAK dan standar audit dan syarat serta prosedur pendaftaran saham perusahaan di bursa efek.

2. Hak pemegang saham dan fungsi pokok kepemilikan perusahaan. Hak-hak tersebut dilindungi, baik secara hukum maupun oleh masing-masing perusahaan.

3. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham.

Perusahaan wajib menjamin perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham perusahaan, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

4. Peranan *stakeholders* dalam *corporate governance*.

Adanya perlindungan hak dan kepentingan para anggota *stakeholders* non pemegang saham. Hal itu disebabkan karena keberhasilan operasi bisnis perusahaan ditentukan oleh hasil kerjasama para anggota *stakeholders*, termasuk para pemegang saham, karyawan, kreditur, pelanggan dan para pemasok layanan jasa, bahan baku dan bahan pembantu.

5. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan.

Perusahaan wajib melaporkan kepada pemegang saham secara akurat, transparan dan tepat waktu, hal-hal yang bersangkutan dengan kondisi keuangan, perubahan kepemilikan, kinerja bisnis, dan hal-hal penting lainnya yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

6. Tanggung jawab dewan pengurus.

Board of Directors bertanggungjawab atas kepatuhan perusahaan yang mereka kelola terhadap undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, termasuk undang-undang tentang perpajakan, perburuhan, perkreditan, lingkungan hidup dan keselamatan kerja.

Prinsip GCG menurut *The Australian Stock Exchange (ASX)*, 2002:

1. Membangun landasan kerja yang kuat bagi manajemen perusahaan dan *Board of Directors*. (*establish solid foundation for managemet oversight by the Board*).

Agar dapat mencapai tujuan bisnis mereka secara berhasil perusahaan wajib membangun kesadaran para anggota manajemen atas hak dan tanggung jawab mereka. *Board of Directors* wajib menghayati dan melaksanakan hak mereka mengendalikan dan mengawasi kegiatan bisnis perusahaan.

2. Menyusun struktur organisasi *The Board of Directors* yang dapat menjamin efektifitas kerja dan meningkatkan nilai perusahaan (*structure the board to add value*).
3. Mengembangkan kebiasaan mengambil keputusan yang etis dan dapat dipertanggungjawabkan (*promote ethical responsible decision making*). Kebiasaan tersebut wajib dimulai dari tingkat atas dalam organisasi perusahaan.
4. Menjaga integritas laporan keuangan.
ASX menganjurkan manajemen perusahaan publik menyusun laporan keuangan tengah tahunan dan menyampaikannya kepada *Board of Directors*. Selanjutnya *the Boards* akan meneruskannya kepada para pemegang saham.
5. Mengungkapkan semua informasi tentang kondisi dan perkembangan perusahaan kepada pemegang saham secara tepat waktu dan seimbang (*make timely and balanced disclosure*).
6. Menghormati hak dan kepentingan para pemegang saham (*respect the right of shareholders*).

7. Menyadari adanya risiko bisnis dan mengelolanya secara profesional (*recognise and manage risk*).

Perusahaan yang ditata kelola secara sehat menyusun prosedur mengevaluasi risiko bisnis dan investasi yang mungkin akan mereka hadapi. Mereka mengelola risiko bisnis secara profesional.

8. Mendorong peningkatan kinerja *Board of directors* dan manajemen perusahaan (*encourage enhanced performance*).

9. Menjamin pemberian balas jasa pimpinan dan karyawan perusahaan yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan (*renumerate fairly and responsibly*).

10. Memahami hak dan kepentingan *the stakeholders* yang sah. (*recognize legitimate interests of stakeholders*).

Prinsip-prinsip GCG menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), 2001:

1. *Fairness* (Kewajaran)
 - a. Membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas.
 - b. Membuat pedoman perilaku perusahaan (*corporate conduct*) dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, *self-dealing*, dan konflik kepentingan.
 - c. Menetapkan peran dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi dan komite, termasuk sistem remunerasi.

- d. Menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun.
- e. Mengedepankan *equal job opportunity*.

2. *Disclosure and Transparency* (Transparansi)

- a. Mengembangkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- b. Mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS) untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi.
- c. Mengembangkan *enterprise risk management* yang memastikan bahwa semua risiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat toleransi yang jelas.
- d. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.

3. *Accountability* (Akuntabilitas)

- a. Menyiapkan laporan keuangan (*financial statement*) pada waktu yang tepat dengan cara yang tepat.
- b. Mengembangkan komite audit dan risiko untuk mendukung fungsi pengawasan oleh dewan komisaris.

- c. Mengembangkan dan merumuskan kembali peran dan fungsi internal audit sebagai mitra bisnis strategik berdasarkan *best practices* (bukan sekedar audit).
 - d. Menjaga manajemen kontrak yang bertanggungjawab dan menangani pertentangan (*dispute*).
 - e. Penegakan hukum (sistem penghargaan dan sanksi).
 - f. Menggunakan *external auditor* yang memenuhi syarat (berbasis profesionalisme).
4. *Responsibility* (Responsibilitas)
- a. Kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang.
 - b. Menyadari akan adanya tanggung jawab sosial.
 - c. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
 - d. Menjadi profesional yang menjunjung etika.
 - e. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Prinsip-prinsip GCG menurut Bank Indonesia, 2007:

2. Kewajaran
- a. Membuat peraturan yang dapat melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.
 - b. Membuat kebijakan melindungi perusahaan.
 - c. Menyajikan informasi secara wajar/dengan pengungkapan penuh.

3. Pengungkapan dan Transparansi
 - a. Mengungkapkan informasi yang akurat.
 - b. Menerapkan sistem akuntansi.
 - c. Mengembangkan *information technology* (IT) dan *management information system* (MIS).
 - d. Mengembangkan *enterprise risk management*.
 - e. Mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka.
4. Akuntabilitas
 - a. Menyiapkan laporan keuangan.
 - b. Mengembangkan peran satuan pengawas intern mendukung fungsi satuan pengawas intern.
 - c. Merumuskan peran dan fungsi satuan pengawas intern.
 - d. Penegakan hukum.
 - e. Menggunakan satuan pengawas intern yang memenuhi syarat.
5. Pertanggungjawaban
 - a. Adanya tanggung jawab sosial perusahaan.
 - b. Menghindari penyalahgunaan kekuasaan.
 - c. Aparat perusahaan dalam bekerja berusaha menjadi profesional.
 - d. Memelihara lingkungan bisnis yang sehat.
6. Independensi
 - a. Mengelola perusahaan secara profesional.
 - b. Menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar.

- c. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan dari berbagai pihak.

Keputusan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002. GCG dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi faktor utama pelaksanaan GCG, prinsip-prinsip yang dimaksud dalam keputusan ini adalah meliputi :

- 1) Tranparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- 2) Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan di kelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.
- 3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan tanggung jawab Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
- 4) pertanggung jawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 5) kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Tjager , 2003)

B. Penelitian Terdahulu

Herisno (2008), menguji pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan risiko operasional pada lembaga perbankan di kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan secara empiris seberapa besar pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan risiko operasional lembaga perbankan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kantor Cabang Perbankan di kota Padang. Peneliti menjadikan seluruh populasi sebagai sampel (*total sampling*) dikarenakan jumlahnya tidak melebihi 100 subjek. Responden terdiri dari 23 Pemimpin Cabang Perbankan dan 23 pengawas Bank Indonesia sehingga total responden adalah 46 orang. Penelitian ini memakai uji statistik F hitung dimana nilai *adjusted R square* didapat sebesar 0.346 yang berarti bahwa kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 34.6%, sedangkan sisanya sebesar 65.4% dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari analisis pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta pengaruhnya terhadap pencegahan risiko operasional lembaga perbankan adalah pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan risiko operasional lembaga perbankan di kota Padang.

C. Kerangka konseptual

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perseorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya suatu risiko.

Manajemen risiko yang baik dapat membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Dengan berjalannya sistem manajemen risiko di perusahaan, maka perusahaan akan dapat mencegah risiko yang akan timbul dalam kegiatan operasional perusahaan agar perusahaan dapat mencapai hasil yang optimal.

Dampak risiko operasional timbul karena munculnya gangguan operasional dari dalam atau luar perusahaan. Gangguan operasional dari dalam perusahaan dapat berupa kerusakan mesin atau peralatan produksi yang lain, kesalahan manusia dan kesalahan sistem dan prosedur operasi. Sedangkan contoh gangguan dari luar perusahaan dapat berupa krisis moneter, krisis politik, faktor persaingan pasar, keterlambatan pasokan bahan dari perusahaan pemasok dan bencana alam.

Pengendalian intern (*internal control*) meliputi rencana organisasi dan semua metode yang terkordinir dan tindakan/ukuran yang ditetapkan di dalam suatu perusahaan untuk mengamankan harta (kekayaan)nya, mencek ketelitian, dan keandalan data akuntansinya, meningkatkan efisiensi operasi dan mendorong ketaatan kepada kebijaksanaan yang ditetapkan oleh manajemen. Sedangkan pengertian risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko operasional perusahaan dapat ditekan dengan menerapkan prinsip-prinsip dari *good corporate governance*. Hal ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian intern yang baik.

Dengan adanya sistem pengendalian intern yang handal dapat mencegah timbulnya kerugian karena penggunaan sumberdaya yang boros, keputusan manajemen yang tidak akurat dan sebagainya. Konsep pengendalian ini semakin lama semakin penting dan menempati posisi yang strategis karena ancaman terhadap risiko operasional meningkat baik dari sisi jenis maupun intensitasnya. Dengan demikian sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian intern yaitu rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen.

Good corporate governance juga mempunyai pengaruh dalam upaya mencapai kinerja bisnis yang optimal serta dalam analisis dan pengendalian risiko bisnis yang dihadapi perusahaan. *Good corporate governance* (GCG) dapat mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional perusahaan yang dilakukan oleh manajemen serta membantu perusahaan dalam menjalankan prinsip-prinsipnya sendiri yang sudah ada. GCG merupakan suatu sistem atau seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pihak yang berkepentingan terutama pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi, agar dapat mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam mencapai tujuan perusahaan.

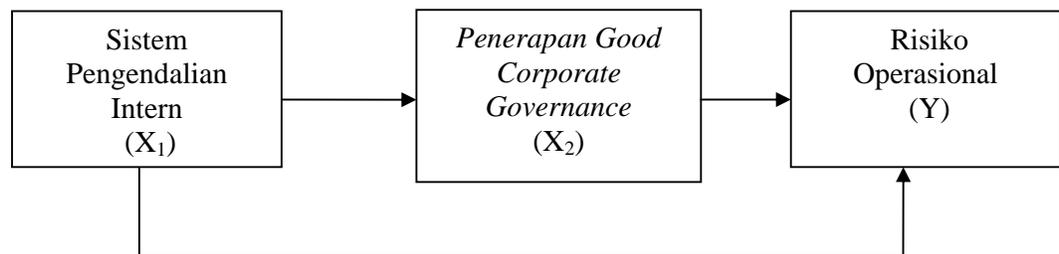
Pelaksanaan praktik GCG ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan seperti adanya pernyataan menyesatkan, penyalahgunaan informasi keuangan, dan sistem akuntansi yang buruk. Prinsip *fairness* menyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang

saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin. Prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip tertua dalam bidang hukum perusahaan. Pada umumnya, penerapan prinsip ini ditujukan untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk akibat kurang terbukanya perusahaan terhadap para pemegang saham, seperti adanya pernyataan menyesatkan, sistem akuntansi yang buruk, dan penyalahgunaan informasi keuangan. Prinsip *disclosure and transparency* mensyaratkan adanya jaminan mengenai pengungkapan yang tepat waktu dan akurat terhadap semua hal serta faktor-faktor risiko bersifat material dapat diperkirakan.

Prinsip akuntabilitas yang didasarkan pada sistem *checks and balances* mencakup praktik audit yang sehat akan menghindari konflik antara direksi dan pemegang saham sehingga kerugian-kerugian yang timbul di perusahaan dapat dicegah. Rusaknya nama baik perusahaan akan menimbulkan kerugian yang sama besarnya dengan kerugian produksi atau penjualan, bahkan mungkin lebih besar bagi setiap kreditur yang ada. Untuk mencegah semua kemungkinan buruk tersebut, implementasi prinsip tanggung jawab harus secepatnya dijalankan.

Prinsip independensi menyatakan pengelolaan sebuah perusahaan secara profesional. Pelaksanaan prinsip ini ditujukan untuk menghindari kerugian akibat adanya dominasi yang tidak wajar dalam perusahaan dan untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan dari berbagai pihak. Kecurangan yang terjadi dalam perusahaan menandakan lemahnya pelaksanaan prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas di perusahaan yang mengakibatkan kerugian keuangan dan penurunan reputasi bisnis.

Penelitian ini menguji pengaruh sistem pengendalian intern, penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap risiko operasional perusahaan. Dari teori-teori yang dipaparkan dapat diartikan bahwa pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip GCG terhadap risiko operasional berpengaruh signifikan. Karena apabila sistem pengendaliannya baik dan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG maka risiko operasional akan dapat di tekan. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka dapat dibuat hipotesis terhadap permasalahan tersebut yaitu:

- H₁ : Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko operasional perusahaan.
- H₂ : Pelaksanaan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG
- H₃ : Pelaksanaan Penerapan prinsip-prinsip GCG berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko operasional perusahaan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis dari pengaruh sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap risiko operasional perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan arahnya negatif terhadap risiko operasional perusahaan pada perusahaan BUMN di Kota Padang.
2. Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* pada perusahaan BUMN di Kota Padang.
3. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* berpengaruh signifikan dan arahnya negatif terhadap risiko operasional perusahaan pada perusahaan BUMN di Kota Padang.

B. Keterbatasan Penelitian

Hasil dari penelitian ini tidak digeneralisasi, dengan kata lain penelitian ini hanya berlaku di kota Padang. Selain itu ada variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini, seperti risiko kredit, risiko hukum, risiko liquiditas, risiko reputasi, risiko bunga, dan risiko pasar.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi kepala cabang perusahaan, karyawan dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan agar dapat meningkatkan sistem pengendalian intern dan menerapkan semua prinsip-prinsip *good corporate governance* sehingga perusahaan terhindar dari dominasi yang tidak wajar yang dapat menimbulkan risiko bagi perusahaan dan mengancam kestabilan perusahaan sehingga dapat merugikan perusahaan.
2. Pada penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap risiko operasional perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. 2008. *“Tiga Pilar yang Menegakkan GCG”*. diakses (www.governance-indonesia.com). (9/6/2008).
- Arens, Alvin A. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance, Edisi keduabelas Jilid*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2006. *Pemeriksaan Akuntansi I*. Jakarta: Erlangga.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Terpadu*. Jakarta: PT Rineka Sipta.
- Dunil, Z. 2005. *Risk-Based Audit*. Jakarta: PT. Ideks Kelompok Gramedia.
- Husein Umar. 1999. *Metode Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Herisno, Rhomi. 2008. Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pencegahan Risiko Operasional Lembaga Perbankan di Kota Padang. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Irianto, Agus. 2004. *Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Anonim (Tanpa Nama). 2007. Perekonomian Mandul dan Momentum Bangkitnya Perekonomian Indonesia. diakses <<http://www.kompas.co.id/kompascetak/0312/15/ekonomi/739100.htm>>
- Krismiaji. 2002. *Sistem Informasi Akuntansi*. Unit penerbit dan percetakan AMP YKPN, Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba empat.
- Anonim (Tanpa Nama). 2008. BankMandiri Cabang Indarung di Gugat Lembaga Konsumen. Diakses(<http://www.padangkini.com>),[30/7/2008]
- Santoso, Singgih. 2000. *Buku SPSS*. Jakarta: Elex Media Komputindo Gramedia.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2005. *Metode Peneelitan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.